



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jujur, kompeten, bermanfaat

RENJA **(RENCANA KERJA)** **PERUBAHAN**

INSPEKTORAT

KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690809 199803 1 006

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini seluruh pemangku kepentingan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaen Kebumen.

Kebumen, 26 Juni 2025
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Junita P	
Hantari Muttadewi	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	30
C. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	37
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.....	40
E. Reviu Usulan Program dan Kegiatan.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	58
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	58
B. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	61
C. Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
L A M P I R A N	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	7
Tabel 2.2. Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	32
Tabel 2.5. Capaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	33
Tabel 2.6. Hasil Evaluasi Komponen SAKIP Tahun 2024	34
Tabel 2.7. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2024	35
Tabel 2.8. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 ..	36
Tabel 2.9. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	37
Tabel 2.10. Perbandingan Antara Renja Murni Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025.....	46
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2022-2026	62
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Urusan Inspektorat Daerah Tahun 2022- 2026.....	62
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang Terfokus pada Kawasan Tertentu...	64
Tabel 3.4. Program dan Kegiatan yang Tersebar ke berbagai Kawasan.....	65
Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	66
Tabel 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi permasalahan yang ada serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBDP Kabupaten Kebumen.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja tahun 2025 dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 antara lain :

1. Substansi Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sama dengan materi Rancangan Renja Awal Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2025.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

4. Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 yang direncanakan dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah, perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan kinerja untuk Tahun 2025;

2. Tujuan

- a. Agar dapat mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien berdasarkan pagu indikatif;
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

- c. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan Nasional dan Provinsi;
- d. Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 dan capaian kinerja triwulan II tahun 2025, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Tahun 2025, serta program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Memuat rencana kerja perubahan dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

BAB V PENUTUP.

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Evaluasi ini penting karena untuk membandingkan proyeksi capaian akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran diperlukan pendanaan sesuai peruntukannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 menggunakan 3 Program.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian	APBD Murni (Rp)	APBD Refocusing (Rp)
	INSPEKTORAT DAERAH	16.679.338.000	16.327.744.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.007.338.000	9.931.870.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.600.000	42.140.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000	31.540.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.600.000	10.600.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.255.706.000	9.255.488.000
a	Penyediaan Gaji dan	9.241.706.000	9.241.706.000

No	Uraian	APBD Murni (Rp)	APBD Refocusing (Rp)
	Tunjangan ASN		
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000	13.782.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.904.000	52.776.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.904.000	52.776.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.500.000	92.363.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	13.500.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	8.150.000
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	9.000.000	7.907.000
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000
e	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	13.842.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	41.865.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	3.599.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.000.000	139.900.000
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	20.000.000
b	Pengadaan Mebel	20.000.000	80.000.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	39.900.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.532.000	187.107.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.132.000	122.132.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.400.000	61.975.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.096.000	162.096.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	137.096.000	137.096.000

No	Uraian	APBD Murni (Rp)	APBD Refocusing (Rp)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.283.000.000	6.064.046.000
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.098.000.000	5.912.143.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	90.000.000	77.181.000
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	210.000.000	173.100.000
c	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000	36.219.000
d	Reviu Laporan Keuangan	60.000.000	45.973.000
e	Pengawasan Desa	5.530.000.000	5.453.737.000
f	Kerjasama Pengawasan Internal	98.000.000	83.716.000
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.000.000	42.217.000
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	185.000.000	151.903.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	65.000.000	48.680.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	120.000.000	103.223.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	389.000.000	311.828.000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	26.000.000	19.623.000
a	Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan	13.000.000	8.892.000
b	Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13.000.000	10.731.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	363.000.000	292.205.000
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000	43.872.000
b	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60.000.000	47.773.000
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	180.000.000	143.447.000

No	Uraian	APBD Murni (Rp)	APBD Refocusing (Rp)
	Pemberantasan Korupsi		
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.000.000	57.113.000

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.2 berikut;

EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2025

Tabel 2.2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025	Ting kat Real isasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9 /8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)
6	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	32 %	32	32 %	32
6.01.0 1.2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Doku men	9 Do Ku men	10 Do ku men	10 Doku men	10 Doku men	7 Doku men	70	10 Doku men	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	12=(11/4)
6.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	5 Do ku men	6 Do ku men	6 Doku men	6 Doku men	3 Doku men	50	6 Doku men	11=5+6+7+9	100
6.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lap oran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapora n	100	4 Lapora n	4	100
6.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bula n	12 Bu lan	12 Bu lan	12 Bula n	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12	100
6.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	73 Oran g	51 Ora ng	53 Ora ng	53 Oran g	55 Orang	73 Orang	132,73	73 Orang	73	100
6.01.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifika si Keuangan	5 Doku men	75 Do ku men	75 Do ku men	75 Doku men	5 Doku men	3 Doku men	5,7	75 Doku men	75	1500
6.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Oran g	51 Ora ng	51 Ora ng	3 Oran g	4 Oran g	0 Orang	0	0 Orang	51 Orang	1.275

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	Orang	51	Orang	51	Orang	3	Orang	4	Orang	0	Orang	51	Orang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=5+6+7+9			12=(11/4)			
6.01.0 1.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50	12	Bulan	12	Bulan	100
6.01.0 1.2.06 1.2.06. 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	100
6.01.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	6	Paket	100	60	Paket	60	Paket	100
6.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Pengadaan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	1	Paket	50	2	Paket	2	Paket	100
6.01.0 1.2.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan	12	Dokumen	28	Dokumen	28	Dokumen	6	Dokumen	50	12	Dokumen	12	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11-5+6+7+9	12=(11/4)				
0006	Perundang-undangan	Peraturan Perundang- Undangan			n										
6.01.0 1.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	3	1	1	3	Paket	1	100	3	Paket	100	3	Paket	100
6.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	20	20	20	12	Lapo ran	10	50	20	Lapo ran	50	20	Lapo ran	100
6.01.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	4	3	4	3	Doku men	3	75	4	Doku men	75	4	Doku men	100
6.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Mtilik Daerah	1	2	14	0	Unit	29	96,67	46	Unit	96,67	46	Unit	4600
6.01.0 1.2.07 .0005	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Di Sediakan	0	0	4	0	Unit	24	100	28	Unit	100	28	Unit	2800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			0	4	0	5	9	6	7	5	8	5	9	Ting kat Reali sasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8				11=5+6+7+9		12=(11/4)
6.01.0 1.2.07. 0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	9	Unit	0	Unit	5	Unit	9	Unit	14	Unit	1400
6.01.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	Unit	2	Unit	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	3	Unit	300
6.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	12	Bulan	100
6.01.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Bulan	12	Laporan	100
6.01.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Bulan	12	Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025	Ting kat Real isasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)
		Dan Listrik									
6.01.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan	12	12	12	14	12	6	100	12	100
6.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	89	55	75	80	58	25	60,34	80	89,87
126.01 .01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	28	24	24	28	24	10	41,67	28	100
6.01.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	30	30	52	34	15	44,12	52	86,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			0	Unit	0	Unit	20	Unit	0	Unit	0	Unit	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025	Ting kat Real isasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	12-(11/4)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10-(9/8)	11=5+6+7+9	12-(11/4)	
6.01.0 1.2.09. 0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel Yang Dipelihara	0	Unit	0	Unit	20	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	20	Unit	200
6.01.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	2	Unit	200
6.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas Apip	3	Level	3	Level	3	Level	3	Level	3	Level	0	Level	100	3	Level	100
6.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	105	Lapo ran	71	Lapo ran	552	Lap oran	264	Lapo ran	149	Lapora n	102	Lapora n	68,45	989	Lapora n	941
6.01.0 2.2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20	Lapo ran	8	Lapo ran	23	Lap oran	61	Lapo ran	8	Lapora n	32	Lapora n	400	124	Lapora n	620
6.01.0 2.2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20	Lapo ran	2	Lapo ran	2	Lap oran	34	Lapo ran	24	Lapora n	10	Lapo ran	41,67	48	Lapo ran	240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			5	Lapo ran	5	Lapo ran	5	Lapo ran	7	Lapo ran	8	9	10=(9 /8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9 /8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)					
6.01.0 2.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5	Lapo ran	5	Lap oran	7	Lapo ran	5	Lapora n	5	Lapo ran	22	Lapo ran	440	
6.01.0 2.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15	Lapo ran	28	Lapo ran	76	Lapo ran	37	Lapora n	15	Lapo ran	124	Lapo ran	826,67	
6.01.0 2.2.01. 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	Lapo ran	14	Lapo ran	81	Lapo ran	70	Lapora n	37	Lapo ran	555	Lapo ran	555	
6.01.0 2.2.01. 0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Yang Terbentuk	1	Kese paka tan	1	Kese paka tan	1	Kese paka tan	1	Kesep akatan	0	Kesepa katan	1	Kesepa katan	100	
6.01.0 2.2.01. 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	5	Doku men	4	Dok umen	4	Doku men	4	Doku men	3	Doku men	15	Doku men	300	
6.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	27	Lapo ran	60	Lapo ran	44	Lapo ran	33	Lapora n	13	Lapo ran	205	Lapo ran	759	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
				Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)				
6.01.0 2.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dengan Tujuan Tertentu	2	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	1	33,33	11	Laporan	550
6.01.0 2.2.02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	25	Laporan	85	Laporan	42	Laporan	30	Laporan	12	40	194	Laporan	776
6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai persepsi anti korupsi	3.5	Nilai	3,90	Nilai	3,75	Nilai	3,50	Nilai	0	108	3,50	Nilai	100
6.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	4	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	5	Dokumen	3	100	24	Dokumen	600
6.01.0 3.2.01. 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang	1	Rekomendasi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	0	0	7	Rekomendasi	700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=5+6+7+9	12=(11/4)	
6.01.0 3.2.01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	3	Reko men dasi	5	Reko men Dasi	3	Rekom endasi	100	15	Rekom endasi	500
6.01.0 3.2.02 0001	Pedampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi	24	OPD	26	OPD	24	OPD	100	52	OPD	217
6.01.0 3.2.02. 0001	Pedampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	24	PD	24	PD	24	PD	100	52	PD	217
06.01. 03.2. 02. 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13	PD	24	OPD	13	PD	161	24	PD	185

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
			8	4	24	5	8	6	7	8	9	Ting kat Reali sasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4			5		6		7		8		10=(9/8)		11=5+6+7+9		12=(11/4)	
6.01.0 3.2.02. 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	8	Kegia tan	24	OPD	8	Kegi a tan	8	Kegia tan	1	Kegia tan	8	Kegia tan	12,5	8	Kegia tan	100	
6.01.0 3.2.02. 0004	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	8	PD	24	OPD	24	PD	7	PD	4	PD	24	PD	57,14	24	PD	300	

Berdasarkan Tabel 2.2 hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja program yaitu cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% realisasi 100%.

Program penunjang terdiri dari 6 kegiatan. Dari 6 kegiatan tersebut rata - rata capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, capaian kinerja program yaitu nilai leveling APIP target level 3 dan terealisasi Level 3, sehingga capaiannya 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, adalah jumlah penyelenggaraan pengawasan internal dengan target 157 laporan dan terealisasi 264 laporan, sehingga capaiannya 168%. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain reviu penyaluran subsidi harga pangan, pemantauan dan evaluasi pada puskesmas, reviu laporan keuangan BLUD Tahun 2023, reviu LKPD Tahun 2023, audit kinerja, pemeriksaan kas opname, reviu pengelolaan pekerjaan pengadaan langsung, reviu LPPD, reviu RKPD, reviu RPJPD, reviu perbup SHSD, reviu TKDN, reviu rancangan perbup ASB, audit pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kinerja BUMDes, reviu PBJ desa, pemantauan atas dana transfer ke desa, sial, pemeriksaan APBD Desa, koordinasi Tim Saber Pungli, monitoring dan evaluasi pelaksanaan saber pungli, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan target 37 laporan dan terealisasi 44 laporan sehingga capaiannya 118%. Kegiatan berupa penanganan penyelesaian kerugian negara, pemeriksaan untuk tujuan tertentu atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian, audit

investigasi, pemeriksaan khusus atas pengaduan Masyarakat, revidi HPS, probity audit dan revidi manajemen ASN.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, capaian kinerja program nilai persepsi korupsi dengan target 3,45 adapun realisasi adalah 3,75, sehingga capaiannya 109%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Capaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang tersusun, yaitu:

- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/710 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/567 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/629 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyuluh Antikorupsi dan Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Kabupaten Kebumen
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.6.2/684 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2024 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan target 52 OPD terealisasi 52 OPD, sehingga capaiannya 100%. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan antara lain:

- Asistensi penilaian mandiri SPIP;
- Pendampingan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2024 kepada 24 perangkat daerah;
- Sosialisasi evaluasi internal reformasi birokrasi ex-ente Tahun 2024;
- Evaluasi internal reformasi birokrasi on going triwulan 1 dan 2 Tahun 2024;
- Pendampingan pengisian LHKPN dan LHKAN;
- Sosialisasi pedoman MCP Korsupgah KPK Tahun 2024;
- Fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dokumen MCP;
- Monitoring desa anti korupsi;
- Monitoring Pendidikan anti korupsi;
- Monitoring MCP triwulan II dan IV;
- Sosialisasi gratifikasi;
- Sosialisasi penyusunan rencana kerja zona integritas Tahun 2024;
- Asistensi penilaian mandiri Pembangunan zona integritas Tahun 2024;
- Reviu penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

b. Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi s/d TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Maturitas SPIP	3,40	0	0
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	54%	54

6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7 Dokumen	70%
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	50%
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	6 Bulan	100%
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	53 Orang	96,36%
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	5,7%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	0	0%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0	0%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	6 Bulan	25%
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	50%
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	50%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

		Perundang-undangan yang Disediakan			
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	1	33,33%
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	10 Laporan	10%
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	29 Unit	96,67%
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	100%
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6 Bulan	50 %
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	6 Laporan	50%
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	58 Unit	35 Unit	60,34%
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	10 Unit	41,67%

6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	15 Unit	44,12%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3	0	0%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	102	68,45%
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	32 Laporan	400%
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	10 Laporan	41,67%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	100%
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	15 Laporan	40,54%
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	37 Laporan	52,85%
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	0	0%
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan	13 Laporan	39,39%
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	3 Laporan	1	33,33%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	12 Laporan	40%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Persepsi Korupsi	3.45	0	0%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	3 Dokumen	60%

6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	0	0%
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis dibidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 OPD	24 OPD	100%
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	100%
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	161%
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	1 Kegiatan	12,5%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	57,14%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama yaitu nilai maturitas SPIP sampai triwulan 2 tahun 2025 capaian masih 0, karena belum dilaksanakan penilaian SPIP dan capaian target kinerja ditargetkan pada triwulan 4 Tahun 2025.

2. Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tercapai 32%

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a) RKAP/DPPA Refokusing TA 2025
- b) LKJIP, LKPJ, LPPD TA 2024
- c) Forum Renstra 2025 – 2029 dan Renja TA 2026

- d) Dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja TA 2025, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tri Wulan I, Analisis Pengukuran Kinerja Triwulan I)
- e) Rancangan Awal dan Akhir RKPD/Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026
- f) RKAP Tahun 2025
- g) Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
- h) Penatausahaan keuangan
- i) Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum
- j) Pemeliharaan/pembayaran pajak kendaraan
- k) Pemeliharaan peralatan dan Mesin
- l) Pembelian Laptop, Kursi Rapat

3. Capaian kinerja program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator nilai levelling APIP capaian masih 0% karena belum dilaksanakan penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP dan capaian kinerja di targetkan pada triwulan ke-4. Meskipun demikian untuk capaian kinerja sub kegiatan pada program penyelenggaraan pengawasan sudah tercapai dengan baik. Hanya saja terdapat 1 sub kegiatan yang belum terdapat capaiannya, yaitu sub kegiatan Kerjasama pengawasan internal karena capaian target kinerja direncanakan di triwulan 3 Tahun 2025.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a) Audit kinerja pada PT. Luk Ulo Farma (Perseroda);
- b) Pemeriksaan Kinerja pada 6 BUMDesa
- c) Reviu pengadaan barang dan jasa desa sebanyak 30 desa
- d) Monitoring pembangunan gedung serbaguna Desa Prembun
- e) Pemantauan atas dana transfer ke desa sebanyak 1 desa
- f) Reviu RPJMD
- g) Reviu LPPD
- h) Evaluasi SAKIP
- i) Reviu RKPD Tahun 2026
- j) Reviu RKPD Perubahan Tahun 2025
- k) Pemeriksaan kas opname;
- l) Reviu DAU Earmarked;
- m) Reviu Pajak daerah

- n) Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada 26 kecamatan.
 - o) Reviu Piagam Audit Charter (IACM);
 - p) Reviu Laporan Kinerja BLUD;
 - q) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Puskesmas Kebumen III;
 - r) Audit Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian pada Puskesmas
4. Capaian Kinerja Program Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi dengan indikator nilai persepsi korupsi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 capaian masih 0, karena belum dilaksanakan survey penilaian integritas. Meskipun demikian sudah terdapat kegiatan yang dilaksanakan antara lain;
- a) Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/110 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b) Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - c) SK Admin LHKAN Perangkat Daerah. Penyusunan SK Tim (SK Tim UPG), dan Asistensi pengisian LHKPN/LHKAN;
 - d) Bimtek SPIP untuk Asesor Pemda
 - e) Asistensi Penyusunan FRA dan RTP
 - f) Asistensi pengisian LHKPN;
 - g) Sosialisasi pedoman MCP;
 - h) Fasilitasi pengumpulan data responden SPI
 - i) Monitoring MCP triwulan

B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah periode Tahun 2021 – 2026. Adapun indikator-

indikator yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

Capaian indikator nilai SAKIP ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui evaluasi SAKIP.

b. Tingkat Maturitas SPIP;

Capaian tingkat maturitas SPIP ditentukan berdasarkan hasil evaluasi BPKP dan Penjaminan Kualitas oleh APIP

c. Nilai Leveling APIP;

Nilai Leveling APIP ditentukan dari Evaluasi BPKP.

d. Nilai Persepsi Korupsi.

Nilai Persepsi Korupsi dihasilkan dari Survey Penilaian Integritas Yang dilaksanakan oleh KPK

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan Maturitas SPIP sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024(thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	69	71	74	77	66,11	67,54	72*	-	Tidak tercapai		
2	Tingkat Maturitas SPIP		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,20	3,30	3,40	3,50	3,19	3,301	3,40*	-	Tercapai		
3	Nilai Leveling APIP		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3*	-	Tercapai		
4	Nilai Persepsi Korupsi		Nilai Persepsi Korupsi	3,40	3,45	3,50	3,50	3,90	3,75	3,50*	-	Tercapai		

Tabel 2.5
Capaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Urusan pemerintahan dan program	Indikator	Target tahun ke-			Realisasi tahun ke-			Ket
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3*	Tercapai
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	3.40	3.45	3,50	3.90	3.75	3,50*	Tercapai

*pencapaian tahun 2025 menggunakan asumsi

Berdasarkan Tabel 2.4 dan 2.5 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan indikator tujuan Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No.B/241/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen adalah 67,54 dari target 71 sehingga capaiannya adalah 95,13%. Nilai 67,54 masuk dalam predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi komponen yang dinilai adalah sebagaimana Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Hasil Evaluasi Komponen Nilai SAKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,19
3	Pelaporan Kinerja	15	10,06
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67.54
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

b. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan indikator kinerja urusan pengawasan. Berdasarkan Laporan Kepala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta No.PE.09.03/LHP-394/PW12/3/2024 tanggal 17 Desember 2024 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, nilai maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen terealisasi 3,301 dari target 3,30 sehingga capaian kinerjanya 100,03% atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP

pada Level 3 (terdefinisi). Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen diuraikan sebagaimana tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Penilaian per Komponen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi		Naik/turun Nilai Komponen
		Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	
	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		3,339		3,301	0,038
1	Penetapan tujuan	4,000	1,600	4,000	1,600	(0,0)
2	Struktur dan Proses	3,147	0,944	2,921	0,876	(0,226)
3	Pencapaian Tujuan	2,650	0,796	2,750	0,825	0,100

Adapun hasil evaluasi BPKP atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah dan risiko operasional perangkat daerah. Rencana tindak pengendalian sudah diimplementasikan namun rencana tindak pengendalian belum dilakukan penilaian efektifitas tindak pengendalian menurunkan level risiko secara berkala oleh perangkat daerah, karena belum sepenuhnya dapat mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab.
2. Kebijakan tentang pengendalian sudah dibangun dan diimplementasikan, namun belum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membangun komunikasi yang efektif, namun komunikasi yang efektif belum dilakukan secara berkala;
4. Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut pada periode 2019 – 2023, namun terdapat temuan

pemeriksaan berulang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

c. Nilai Leveling APIP

Level Kapabilitas APIP merupakan indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan dan indikator kinerja kunci (IKK) Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PE.09.03/LHP-223/PW12/6/2024 tanggal 9 Agustus 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kebumen Tahun 2024, bahwa Inspektorat Kabupaten Kebumen telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP Level 3 (**Delivered**) dengan skor 3,27.

Rincian hasil evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP sebagaimana tabel 2.8

Tabel 2.8

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0,63	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,72	4	0,63	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4	0,24	4
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,48	4	0,48	4
6	Peran dan Layanan	1,60	3	1,20	3
Simpulan		3,85	3	3,27	3

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kebumen telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik professional, serta hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Kebumen cukup berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Efisien, Efektif, Ekonomis) peringatan dini dan peningkatan efektivitas

Manajemen Resiko (MR), serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Daerah.

d. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi Korupsi merupakan indikator kinerja program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. Nilai Persepsi Korupsi mengambil dari Survey Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas Tahun 2024, hasil survey penilaian integritas untuk Kabupaten Kebumen adalah 75,00. Nilai Survey Penilaian Integritas menggunakan skala 1 sampai 100. Sedangkan nilai persepsi korupsi menggunakan skala 1 sampai 5, sehingga untuk mendapatkan nilai persepsi korupsi maka nilai survey penilaian integritas di konversi menjadi skala 1 sampai 5 yaitu nilai survey penilaian integritas dibagi 20. Dari hasil survey tersebut, maka capaian nilai persepsi korupsi adalah $(75,00/20) = 3,75$.

C. Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah Rp. 16.307.744.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 4.884.225.018 atau 29,95%. Data capaian kinerja keuangan untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.9 berikut

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Keuangan sampai Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
	INSPEKTORAT DAERAH	16.307.744.000	4.884.225.018	29,95
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.931.870.000	4.407.537.828	44,38
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.140.000	15.241.100	36,17
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.540.000	13.361.100	42,36
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.600.000	1.880.000	17,74
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.255.488.000	4.208.762.981	45,47

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.241.706.000	4.204.487.981	45,49
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.782.000	4.275.000	31,02
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.776.000	5.580.000	10,57
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.776.000	5.580.000	10,57
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.363.000	45.961.357	49,76
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000	7.880.500	58,37
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.150.000	3.760.000	46,14
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaaan	7.907.000	5.011.200	63,38
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	1.740.000	49,71
e	Penyediaan Bahan/Material	13.842.000	9.898.800	71,51
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.865.000	14.091.357	33,66
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.599.000	3.579.500	99,46
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.900.000	0	0,00
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0,00
b	Pengadaan Mebel	80.000.000	0	0,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.900.000	0	0,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.107.000	81.184.362	43,39
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	876.800	29,23
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.132.000	54.207.282	44,38
c	Penyediaan Jasa	61.975.000	26.100.280	42,11

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
1.7	Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.096.000	50.808.028	31,34
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.096.000	44.575.028	32,51
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	6.233.000	24,93
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.064.046.000	324.162.978	5,35
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.912.143.000	267.352.553	4,52
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	77.181.000	42.429.451	54,97
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	173.100.000	65.745.788	37,98
c	Reviu Laporan Kinerja	36.219.000	14.124.775	39,00
d	Reviu Laporan Keuangan	45.973.000	23.031.500	50,10
e	Pengawasan Desa	5.453.737.000	89.208.739	1,64
f	Kerjasama Pengawasan Internal	83.716.000	21.158.300	25,27
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42.217.000	11.654.000	27,61
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	151.903.000	56.810.425	37,40
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48.680.000	15.681.225	32,21
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	103.223.000	41.129.200	39,85
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	311.828.000	152.524.212	48,91
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.623.000	7.873.500	40,12
a	Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan	8.892.000	0	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
b	Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.731.000	7.873.500	73,37
3.2	Pendampingan dan Asistensi	292.205.000	144.650.712	49,50
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43.872.000	14.475.200	32,99
b	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47.773.000	25.332.150	53,03
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	143.447.000	73.149.362	50,99
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57.113.000	31.694.000	55,49

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah Rp 4.884.225.018,- (29,95%). Dan terdapat 1 kegiatan yang realisasi keuangannya masih Rp 0,- yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dikarenakan belanja barang berupa pengadaan mebel dan peralatan mesin yang proses pengadaannya melalui e-purchasing terkendala pembayaran dikarenakan adanya pergantian nomor *handphone* bendahara Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

D.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1) Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 secara umum baik.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Dukungan sebagian pimpinan/manajemen perangkat daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan, agenda yang telah ditetapkan akan sulit diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak Kepala Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi;
- b) Auditan/Perangkat Daerah tidak tertib dan tepat waktu dalam memenuhi dokumen untuk bahan audit;
- c) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum, APIP terkadang kesulitan dalam akses untuk memperoleh bukti dan terdapat keterbatasan kompetensi bidang teknis/aduan yang ditangani;
- d) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya;
- e) Obyek pemeriksaan belum seluruhnya selesai menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal dan internal;
- f) Proporsi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- g) Sarana prasarana seperti laptop, kendaraan roda 4 masih kurang memadai.

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Terhadap permasalahan yang ada, dampak yang terjadi antara lain:

- a. Kasus/aduan belum tertangani 100%
- b. Kualitas hasil pemeriksaan belum optimal;
- c. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan belum tepat waktu.

Dampak tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian

visi misi Bupati Kebumen, dimana Inspektorat Daerah mendukung visi misi Bupati Kebumen yang pertama yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov. Dengan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tentu akan mendukung pencapaian visi misi Bupati Kebumen.

4) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pelayanan Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- a) Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
- b) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- c) Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
- d) Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
- e) Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
- f) Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
- g) Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai strategic partner, quality assurance, and consulting.
- h) Penyelesaian audit keuangan dan pengawasan untuk peningkatan pendapatan;
- i) Terdapat beban tugas pengawasan yang diluar program kerja pengawasan yang sudah ditetapkan yang merupakan mandatory yang harus dilaksanakan baik dari kepala daerah maupun pemerintah pusat.
- j) Banyak perangkat daerah yang minta keterlibatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mulai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- a) Komitmen/Dukungan Kepala Daerah yang tercemrin dalam RPJMD dan Internal Audit Charter (IAC);
- b) Kerjasama/koordinasi dengan BPKP Perwakilan DIY dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah terjalin dengan baik;
- c) Sudah ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kepolisian Resor Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen tentang Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Dukungan anggaran;
- e) Dukungan sarana dan prasarana;
- f) Rencana penerapan pengawasan berbasis risiko.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025

- a) Penguatan peran Inspektorat Daerah agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, melalui peningkatan kualitas SDM Pengawasan;
- b) Peningkatan Kapabilitas APIP dan penerapan manajemen risiko pada skala Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c) Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) menyeluruh ke seluruh perangkat daerah secara bertahap;
- d) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- e) Pengawasan SPIP, Reformasi Birokrasi, MCP di perangkat daerah;
- f) Pengawasan desa anti korupsi;
- g) Pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h) Pengawasan kinerja di perangkat daerah dan BUMD;
- i) Penanganan aduan dan probity audit;
- j) Kerjasama pengawasan internal (saber pungli).

E. Review Usulan Program dan Kegiatan

1) Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Program pada Inspektorat Daerah tetap berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun khususnya pada pelaksanaan tahunan. Pada Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Perbandingan antara Renja Murni Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025

No		Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Kebumen	Maturitas SPJP	3,30	10.329.278.493	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTA HAN	Kab Kebu men	Maturitas SPJP	3,30	14.259.220.000		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					INSPEKTORAT DAERAH				14.259.220.000		
6.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Kebumen	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	8.937.278.493	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Kab. Kebu men	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	9.770.262.000		
6.01. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.118.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebu men	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.140.000		
6.01. 01.2. 01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kebu men	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	31.540.000		

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.118.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.600.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.197.528.493	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.995.480.000	
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	8.183.528.493	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ bulan	8.981.698.000	
6.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	13.782.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 orang	67.904.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	52.776.000	
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	67.904.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	52.776.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	149.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	92.363.000	
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.500.000	
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.150.000	
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	7.907.000	
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.500.000	
6.01.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	16.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	13.842.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
6.01. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	41.865.000	
6.01. 01.2. 06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.599.000	
6.01. 01.2. 0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	140.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 Unit	212.400.000	
6.01. 01.2. 07.0 005	Pengadaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20.000.000	
6.01. 01.2. 07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	152.500.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01. 01.2. 07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	39.900.000	
6.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	175.132.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	193.007.000	
6.01. 01.2. 08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
6.01. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	122.132.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	142.132.000	
6.01. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.875.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58 Unit	162.096.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Kebumen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Unit	182.096.000	
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	137.096.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	137.096.000	
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	25.000.000	
6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kab. Kebumen	Level Kapabilitas APIP	3 Level	1.003.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kab. Kebumen	Level Kapabilitas APIP	3 Level	4.177.130.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	PENGAWASAN					PENGAWASAN					
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	818.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	4.025.227.000	
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	90.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	100.265.000	
6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	210.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	173.100.000	
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	50.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	36.219.000	
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	60.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	45.973.000	
6.01.02.2.01.005	Pengawasan Desa	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	250.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	3.543.737.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01.02.2.01.006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	98.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	83.716.000	
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	4 Dokumen	60.000.000	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	4 Dokumen	42.217.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan 33 Obrik	185.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan 33 Obrik	151.903.000	
6.01.02.2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	65.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	48.680.000	
6.01.02.2.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	120.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	103.223.000	

No	Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kebumen	Nilai Persepsi Korupsi	3.50 Nilai	389.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kebumen	Nilai Persepsi Korupsi	3.50 Nilai	311.828.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	26.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	19.623.000	
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di susun	2 Rekomendasi	13.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di susun	2 Rekomendasi	8.892.000	
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	13.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	10.731.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 OPD	363.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 OPD	292.205.000	

Renja Murni Tahun 2025					Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat daerah	53.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat Daerah	43.872.000
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	60.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	47.773.000
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	180.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	143.447.000
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	70.000.000	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	57.113.000

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 diawali adanya penyampaian nota dinas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 000.7.2.3 / 318 / 2025 tanggal 29 April 2025 tentang Permohonan Tambahan Anggaran pada RKPD Perubahan TA 2025 untuk sub kegiatan berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang akan di gunakan untuk diklat teknis dan diklat penjejaran/sertifikasi
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dikarenakan anggaran belanja jasa listrik baru tersedia sampai Bulan Oktober 2025.
- c) Sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor untuk THR P2K
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pengadaan genset beserta rumah genset dan pengadaan laptop sejumlah 10 unit.
- f) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yaitu untuk pengadaan 1 (unit) kendaraan dinas operasional roda 4.
- g) Pengadaan mebel untuk pengadaan meja dan kusi staf CPNS serta untuk mengganti meja dan kursi staf yang kurang layak.
- h) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Kemudian berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor 000.7.2 / 416 / 2025 tentang Entri Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026, yang mendapat alokasi tambahan anggaran adalah sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pengawasan Desa
- g) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Adapun untuk penambahan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta sub kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak mendapat alokasi namun Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan tambahan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan pengadaan kendaraan dinas operasional yang di alokasikan pada anggaran Sub kegiatan Pengawasan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Evaluasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka dilaksanakan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, didalamnya dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/walikota.

Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari:

- 1) BPKP
- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- 3) Inspektorat Provinsi; dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Inspektorat kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Indek Persepsi Anti Korupsi

Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrument pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di lingkungan di Indonesia. Penilaian IPAK merupakan salah satu upaya pembangunan Zona Integritas. Nilai Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kebumen diperoleh dari Survey Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kemenpan dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk Kabupaten Kebumen telah dilakukan pembangunan Zona Integritas pada seluruh perangkat daerah, namun baru ada 1 Perangkat daerah yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, yaitu DPMPTSP. Ke depan pembangunan Zona Integritas juga diimplementasikan ke seluruh Perangkat Daerah. Dalam hal penguatan pengawasan di Kabupaten Kebumen telah dilakukan upaya pencegahan korupsi yaitu pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), merupakan sebuah program pencegahan korupsi yang dinilai oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). Hasil Penilaian MCP Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 92,13. Nilai ini mengandung beberapa unsur nilai :

- Perencanaan dan Penganggaran APBD : 99
- Pengadaan Barang dan Jasa : 95
- Perizinan : 74
- Pengawasan APIP : 89
- Manajemen ASN : 85
- Optimalisasi Pajak Daerah : 91
- Pengelolaan BMD : 98
- Tata Kelola Desa : 100

Selanjutnya, tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Itjen Kemendagri pada Renstra adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah”.

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah “meningkatkan kualitas

pengawasan yang terintegrasi". Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu "meningkatnya pengelolaan manajemen risiko pemma dan meningkatnya peran pengawasan internal".

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi Bupati Kebumen serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Namun demikian, berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci keberhasilan dapat ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi.

Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu; "terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, dengan indikatornya yakni Nilai SAKIP. Kemudian, sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah.

Dalam konteks reformasi birokrasi terdapat perubahan roadmap reformasi birokrasi. Pada tahun sebelumnya reformasi birokrasi berfokus pada 8 area perubahan, namun mulai Tahun 2023 reformasi birokrasi diarahkan pada reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Reformasi Birokrasi tematik berfokus pada 5 sasaran, yaitu penurunan kemiskinan, indeks transformasi digital (khusus stunting), peningkatan realisasi investasi, penanganan laju inflasi dan tingkat penggunaan produk dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen berkontribusi dengan mewujudkan sistem pengawasan intern yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas. Sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya pengawasan internal Pemerintahan Daerah, dengan indikator Maturitas SPIP.

Tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/ Sasaran Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	67	69	71	74	77
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3.50

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Urusan Inspektorat Daerah Tahun 2022-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Maturitas SPIP	Nilai	3,10	3,20	3,30	3,40	3.50

C. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati Kebumen periode Tahun 2021 – 2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat”.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka dilaksanakan 5 misi yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegritas
 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan argo bisnis dan ekonomi kerakyatan
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermatabat
- Berdasarkan visi misi tersebut, misi pertama selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, maka Inspektorat Daerah Kebumen melaksanakan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program kerja yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Tahun 2025 sesuai kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pengkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Dari 3 Program dan 11 Kegiatan terdapat program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu dan ada yang tersebar ke berbagai kawasan.

Daftar program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan dan yang tersebar pada berbagai kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan yang terfokus pada kawasan tertentu

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pemeliharaan Barang Milik	Aparat Inspektorat

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
		Dacrah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dacrah Kab. Kebumen
2	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Perangkat Daerah, Desa, BUMD
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Perangkat Daerah, Desa, Pegawai dan Masyarakat terkait

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan pendanaan mengacu kepada Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor 000.7.2 / 416 / 2025 tentang Entri Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 dengan pagu indikatif untuk Tahun 2025 sebesar Rp 14.259.220.000,00. Anggaran tersebut akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) program. Secara umum kerangka pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Sebelum Perubahan Tahun 2025		Setelah Perubahan Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan PD	100%	8.937.278.493	100%	9.770.262.000
2.	Program penyelenggaraan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	1.003.000.000	3	4.177.130.000
3.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	3,50	389.000.000	3,50	311.828.000
	JUMLAH			10.329.278.493		14.259.220.000

Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran Perubahan Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 4.2

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Maturitas SPIP	3,40	3,40	10.329.278.493	14.259.220.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				10.329.278.493	14.259.220.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	8.937.278.493	9.770.262.000
6.01. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	45.118.000	42.140.000
6.01. 01.2. 01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	32.000.000	31.540.000
6.01. 01.2. 01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	13.118.000	10.600.000
6.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	8.197.528.493	8.995.480.000
6.01. 01.2. 02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	8.183.528.493	8.981.698.000
6.01. 01.2. 02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	5 Dokumen	14.000.000	13.782.000
6.01. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	4 Orang	67.904.000	52.776.000
6.01. 01.2. 05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	67.904.000	52.776.000
6.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	149.500.000	92.363.000
6.01. 01.2. 06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	13.500.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6.01. 01.2. 06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.000.000	8.150.000
6.01. 01.2. 06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.000.000	7.907.000
6.01. 01.2. 06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000	3.500.000
6.01. 01.2. 06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	16.000.000	13.842.000
6.01. 01.2. 06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	90.000.000	41.865.000
6.01. 01.2. 06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	3.599.000
6.01. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	38 Unit	140.000.000	212.400.000
6.01. 01.2. 07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000
6.01. 01.2. 07. 0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	17 Unit	80.000.000	152.500.000
6.01. 01.2. 07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	40.000.000	39.900.000
6.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	175.132.000	193.007.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6.01. 01.2. 08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000
6.01. 01.2. 08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	122.132.000	142.132.000
6.01. 01.2. 08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	47.875.000
6.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58 Unit	59 Unit	162.096.000	182.096.000
6.01. 01.2. 09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	24 Unit	137.096.000	137.096.000
6.01. 01.2. 09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	34 Unit	25.000.000	25.000.000
6.01. 01.2. 09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	0	1 Unit	0	20.000.000
6.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	1.003.000.000	4.177.130.000
6.01. 02.2. 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	149 Laporan	818.000.000	4.025.227.000
6.01. 02.2. 01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	90.000.000	100.265.000
6.01. 02.2. 01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	24 Laporan	210.000.000	173.100.000
6.01. 02.2. 01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	36.219.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6.01. 02.2. 01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	37 Laporan	60.000.000	45.973.000
6.01. 02.2. 01. 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	70 Laporan	250.000.000	3.543.737.000
6.01. 02.2. 01. 0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakat an	1 Kesepakat an	98.000.000	83.716.000
6.01. 02.2. 01. 0007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	42.217.000
6.01. 02.2. 02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan	33 Laporan	185.000.000	151.903.000
6.01. 02.2. 02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	3 Laporan	3 Laporan	65.000.000	48.680.000
6.01. 02.2. 02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	30 Laporan	120.000.000	103.223.000
6.01. 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	3,50 Nilai	3,50 Nilai	389.000.000	311.828.000
6.01. 03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	5 Dokumen	26.000.000	19.623.000
6.01. 03.2. 01. 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen- dasi	2 Rekomen- dasi	13.000.000	8.892.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025		Anggaran Tahun 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
6.01. 03.2. 01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis dibidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	13.000.000	10.731.000
6.01. 03.2. 02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 OPD	24 OPD	363.000.000	292.205.000
6.01. 03.2. 02. 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	53.000.000	43.872.000
6.01. 03.2. 02. 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	60.000.000	47.773.000
6.01. 03.2. 02. 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	180.000.000	143.447.000
6.01. 03.2. 02. 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	70.000.000	57.113.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan rencana kerja Tahun 2025 yang menjadi pedoman penyusunan perubahan program dan kegiatan Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan target kinerja masing-masing sub kegiatan dan kegiatan.
- b. Untuk pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Melaksanakan keputusan Bupati Kebumen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun 2025
3. Mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati Kebumen terkait
4. Mematuhi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa;
5. Mematuhi dan melaksanakan aturan/perintah dari pimpinan.

Apabila diperlukan Rencana Kerja ini akan dilakukan perbaikan.

Kebumen, 26 Juni 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda
NIP.197207231998031006

LAMPIRAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]